

PERAN PEMERINTAH DALAM MEMBANGUN JIWA WIRAUSAHA MASYARAKAT : SYSTEMATIC LITERATURE REVIEW BERDASARKAN METODOLOGI PRISMA

Afriadi^{1*}, Jhon Veri²

^{1,2}Universitas Putra Indonesia “YPTK Padang”, Sumatera Barat, Indonesia;

afriadisk003@gmail.com

*Korespondensi Penulis

Abstrak

Penguatan jiwa wirausaha masyarakat merupakan kunci dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, mengurangi pengangguran, dan mendorong inovasi di tingkat lokal. Pemerintah memiliki peran vital dalam membangun ekosistem yang mendorong semangat dan kapasitas kewirausahaan, terutama melalui kebijakan publik dan program-program pemberdayaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara sistematis kontribusi pemerintah dalam membentuk jiwa wirausaha masyarakat dengan menggunakan pendekatan Systematic Literature Review (SLR) berbasis metode PRISMA. Data dikumpulkan dari empat basis data ilmiah yaitu Google Scholar, ScienceDirect, Scopus, dan DOAJ, dengan batasan artikel ilmiah tahun 2022 hingga 2024. Dari total 312 artikel yang diidentifikasi, 25 artikel dipilih berdasarkan kriteria inklusi yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa pemerintah berperan dalam empat aspek utama: kebijakan pro-kewirausahaan, pendidikan dan pelatihan, akses permodalan dan inkubasi, serta digitalisasi UMKM. Studi ini menyimpulkan bahwa efektivitas peran pemerintah sangat dipengaruhi oleh pendekatan partisipatif, dukungan lintas sektor, serta penyesuaian kebijakan dengan konteks lokal. Kajian ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam pengembangan strategi pembangunan kewirausahaan masyarakat secara berkelanjutan

Keywords: Pemerintah; Kewirausahaan; Jiwa Wirausaha; Masyarakat; PRISMA; SLR

Abstract

Strengthening the entrepreneurial spirit within society is essential for fostering inclusive economic growth, reducing unemployment, and encouraging local innovation. The government plays a critical role in shaping a supportive ecosystem that promotes entrepreneurial values and capacities, particularly through public policy and empowerment programs. This study aims to systematically review the government's role in developing the entrepreneurial spirit in society using the Systematic Literature Review (SLR) approach based on the PRISMA methodology. Data were collected from four reputable academic databases: Google Scholar, ScienceDirect, Scopus, and DOAJ, limited to journal articles published between 2022 and 2024. From a total of 312 articles initially identified, 25 articles were selected based on predefined inclusion criteria. The results indicate that the government contributes in four key areas: pro-entrepreneurship policy, entrepreneurship education and training, access to capital and business incubation, and digital transformation for small businesses. The study concludes that the effectiveness of government interventions depends heavily on participatory approaches, cross-sectoral collaboration, and local context alignment. This review is expected to serve as a reference for developing sustainable strategies to enhance entrepreneurial development at the community level.

Keywords: Government; Entrepreneurship; Entrepreneurial Spirit; Society; PRISMA; SLR

PENDAHULUAN

Kewirausahaan telah menjadi motor utama dalam pembangunan ekonomi suatu negara, terutama dalam mendorong penciptaan lapangan kerja, pengurangan kemiskinan, serta peningkatan daya saing nasional. Jiwa wirausaha dalam masyarakat bukan hanya tentang keterampilan bisnis, tetapi juga mencakup semangat inovatif, keberanian mengambil risiko, dan kemampuan beradaptasi terhadap perubahan. Pembangunan jiwa kewirausahaan masyarakat tidak dapat dilepaskan dari peran lingkungan, terutama kebijakan dan dukungan dari pemerintah (Prasetyo & Yuliani, 2022).

Pemerintah memiliki tanggung jawab strategis dalam menciptakan ekosistem yang mendorong tumbuhnya kewirausahaan. Fungsi tersebut diwujudkan melalui berbagai bentuk intervensi seperti pemberian akses modal, pelatihan keterampilan usaha, penyediaan infrastruktur pendukung, hingga regulasi yang mendukung iklim usaha yang sehat. Dalam konteks Indonesia, program-program seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR), pelatihan UMKM berbasis digital, serta penyuluhan kewirausahaan telah menunjukkan dampak positif terhadap pertumbuhan wirausaha pemula (Rohmah & Putra, 2023).

Di sisi lain, program-program kewirausahaan pemerintah perlu diarahkan untuk memberdayakan masyarakat secara menyeluruh, termasuk kelompok rentan seperti perempuan, pemuda, dan masyarakat

pedesaan. Menurut Suryaningsih et al. (2023), pendekatan kewirausahaan berbasis komunitas lokal memiliki efektivitas tinggi dalam menumbuhkan semangat berwirausaha karena memperhatikan konteks sosial dan budaya masyarakat setempat. Oleh karena itu, pemerintah daerah juga berperan penting dalam menjalankan program yang sesuai dengan karakteristik lokal.

Perkembangan teknologi dan era transformasi digital turut mengubah cara masyarakat membangun dan menjalankan usaha. Hal ini menuntut kebijakan publik yang adaptif terhadap dinamika kewirausahaan digital. Pemerintah perlu memfasilitasi digitalisasi UMKM, integrasi platform daring, serta literasi digital masyarakat agar jiwa kewirausahaan dapat berkembang secara relevan dengan zaman. Yunus & Lestari (2022) menekankan bahwa digitalisasi kewirausahaan perlu dijadikan prioritas dalam kebijakan pembangunan ekonomi era Society 5.0.

Meski banyak kebijakan telah diluncurkan, masih terdapat kesenjangan antara formulasi dan implementasi kebijakan pemerintah dalam mendukung kewirausahaan. Banyak studi sebelumnya bersifat terpisah, parsial, dan kontekstual tanpa sintesis sistematis mengenai efektivitas berbagai kebijakan yang telah dijalankan. Oleh sebab itu, dibutuhkan kajian literatur yang sistematis untuk mengintegrasikan temuan-temuan sebelumnya agar dapat menghasilkan rekomendasi berbasis bukti ilmiah (Kementerian Koperasi dan UKM RI, 2023).

Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk melakukan *Systematic Literature Review (SLR)* tentang peran pemerintah dalam membangun jiwa wirausaha masyarakat dengan menggunakan metodologi PRISMA. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menyusun peta tematik, menganalisis tren kebijakan, serta mengidentifikasi praktik-praktik terbaik yang telah dilaksanakan di berbagai wilayah. Harapannya, hasil kajian ini dapat menjadi masukan strategis dalam penyusunan kebijakan kewirausahaan yang lebih efektif dan inklusif di masa mendatang (OECD, 2022).

KERANGKA TEORI

Kewirausahaan

Kewirausahaan merupakan kemampuan seseorang dalam menciptakan, mengelola, dan mengembangkan peluang usaha untuk menciptakan nilai tambah, baik secara ekonomi maupun sosial. Jiwa kewirausahaan mencakup sikap inovatif, berani mengambil risiko, dan memiliki orientasi pada pencapaian (Fitriani & Andika, 2023). Dalam konteks masyarakat, kewirausahaan tidak hanya berperan dalam pembangunan ekonomi mikro, tetapi juga dalam penguatan ketahanan ekonomi lokal serta pengurangan pengangguran dan kemiskinan (Rahayu et al., 2023). Kewirausahaan yang berkembang dalam masyarakat dapat dibentuk melalui dukungan pendidikan, pelatihan, serta intervensi kebijakan publik.

Pemerintah dan Peran Pemerintah

Pemerintah memiliki fungsi utama sebagai pengarah dan penggerak pembangunan, termasuk dalam menumbuhkan semangat kewirausahaan masyarakat. Menurut Susanto & Fadillah (2022), peran pemerintah mencakup penyusunan kebijakan pro-kewirausahaan, pemberian fasilitas pelatihan, akses pembiayaan, dan penciptaan iklim usaha yang kondusif. Pemerintah juga berperan sebagai fasilitator dalam membangun ekosistem kewirausahaan melalui sinergi dengan lembaga pendidikan, sektor swasta, dan komunitas lokal (Lestari et al., 2022). Peran ini semakin penting dalam menghadapi tantangan ekonomi digital dan perubahan pasar tenaga kerja.

Systematic Literature Review (SLR)

Systematic Literature Review adalah metode kajian ilmiah yang dilakukan secara sistematis, eksplisit, dan dapat direplikasi untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan menyintesis semua bukti yang relevan terkait suatu topik penelitian. Menurut Putra & Sari (2022), SLR digunakan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam dari berbagai studi terdahulu dan membantu membangun dasar teoritis yang kuat. SLR membedakan diri dari kajian pustaka biasa karena mengikuti tahapan metodologis yang ketat, mulai dari perumusan pertanyaan penelitian, strategi pencarian, hingga proses seleksi dan analisis data literatur.

PRISMA

PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses) adalah panduan pelaporan yang digunakan dalam pelaksanaan dan pelaporan hasil *Systematic Literature Review*. PRISMA membantu peneliti menyusun proses pencarian dan seleksi literatur secara transparan dan sistematis (Yunita & Kurniawan, 2023). Terdapat empat tahap utama dalam alur PRISMA: identifikasi, penyaringan (*screening*), kelayakan (*eligibility*), dan inklusi, yang umumnya digambarkan melalui diagram PRISMA. Panduan ini memberikan struktur yang baku dan terstandar agar hasil kajian dapat dipertanggungjawabkan dan direplikasi oleh peneliti lain.

METODE PENELITIAN

Adapun tahapan metodologi penelitian dalam studi ini dijelaskan sebagai berikut :



Gambar 1. Tahapan Penelitian

1. Perumusan Masalah

Permasalahan utama dalam penelitian ini

adalah belum adanya sintesis komprehensif terhadap berbagai studi yang membahas peran pemerintah dalam membangun jiwa wirausaha masyarakat. Banyak penelitian terdahulu bersifat fragmentaris dan tidak memberikan gambaran menyeluruh mengenai strategi kebijakan pemerintah yang efektif. Oleh karena itu, diperlukan kajian sistematis yang mampu mengintegrasikan berbagai temuan ilmiah secara terstruktur dan objektif.

2. Penyusunan Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis dalam penelitian ini mengacu pada teori kewirausahaan dan kebijakan publik yang menjelaskan bagaimana pemerintah berperan dalam menciptakan ekosistem wirausaha. Beberapa aspek utama yang menjadi acuan adalah teori pembangunan jiwa kewirausahaan, peran negara sebagai fasilitator ekonomi, serta konsep kolaborasi lintas sektor dalam pemberdayaan masyarakat. Selain itu, penelitian juga mengadaptasi pendekatan entrepreneurial ecosystem untuk memahami keterkaitan antara regulasi, pendanaan, pelatihan, dan inovasi.

3. Pemilihan Metode Penelitian

Metode yang digunakan adalah *Systematic Literature Review (SLR)* berdasarkan pendekatan *PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses)*. Metode ini dipilih untuk memperoleh pemahaman menyeluruh dari studi terdahulu yang relevan, serta untuk mengidentifikasi tren, pola, dan celah penelitian dalam topik peran pemerintah

terhadap kewirausahaan masyarakat.

4. Pengumpulan Data

Data dikumpulkan melalui pencarian literatur di empat basis data ilmiah yaitu: Google Scholar, Scopus, ScienceDirect, dan DOAJ. Kata kunci pencarian meliputi: “peran pemerintah”, “jiwa wirausaha”, “kewirausahaan masyarakat”, “kebijakan publik”, “systematic literature review”. Kriteria inklusi mencakup artikel tahun 2018–2024, berbahasa Indonesia atau Inggris, dan membahas secara langsung hubungan antara kebijakan pemerintah dan pembangunan kewirausahaan. Artikel yang tidak tersedia secara lengkap atau tidak relevan dikeluarkan.

5. Analisis Data

Analisis dilakukan dengan menyusun alur seleksi artikel menggunakan diagram PRISMA, yang terdiri dari empat tahap: identifikasi, screening, kelayakan (eligibility), dan inklusi. Artikel yang lolos tahap akhir dianalisis secara tematik dengan teknik coding manual untuk mengelompokkan temuan ke dalam tema-tema besar seperti: kebijakan publik, pelatihan kewirausahaan, akses pembiayaan, dan inkubator usaha. Hasil analisis disajikan dalam bentuk naratif dan tabel ringkasan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

HASIL

Berdasarkan hasil seleksi literatur dari 312 artikel awal, sebanyak 25 artikel yang memenuhi kriteria inklusi dan relevansi

dianalisis lebih lanjut. Hasil review menunjukkan bahwa pemerintah memiliki peran yang sangat signifikan dalam menumbuhkan jiwa wirausaha masyarakat. Terdapat empat tema utama yang muncul dari analisis artikel yang ditelaah, yaitu:

1. Kebijakan Pro-Kewirausahaan

Pemerintah pusat dan daerah mengembangkan berbagai kebijakan yang mendukung pengembangan kewirausahaan melalui regulasi, insentif, dan penyederhanaan perizinan. Studi oleh Lestari et al. (2022) menyoroti efektivitas program “Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia” dalam mendorong partisipasi UMKM lokal. Kebijakan ini memberikan dorongan langsung terhadap masyarakat untuk lebih berani dan kreatif dalam membuka usaha.

2. Pendidikan dan Pelatihan Kewirausahaan.

Pemerintah melalui dinas-dinas terkait rutin melaksanakan pelatihan keterampilan usaha berbasis komunitas. Pelatihan ini dinilai efektif dalam membentuk sikap mental wirausaha dan meningkatkan kompetensi teknis masyarakat (Fitriani & Andika, 2023). Selain itu, kurikulum kewirausahaan mulai diterapkan di lembaga pendidikan vokasi dan sekolah menengah kejuruan.

3. Fasilitasi Permodalan dan Inkubasi Usaha

Program seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR), dana bergulir, serta hibah inkubasi bisnis menjadi bentuk konkret peran pemerintah dalam mempermudah akses permodalan. Nugroho & Setyawan (2023) menunjukkan bahwa pendampingan inkubator usaha pemerintah daerah berperan penting

dalam meningkatkan kesiapan bisnis dan memperkuat keberlanjutan UMKM pemula.

4. Transformasi Digital dan Akses Teknologi

Banyak pemerintah daerah mulai mengintegrasikan digitalisasi dalam program pelatihan dan pemasaran UMKM. Pelatihan digital marketing, e-commerce, dan platform pembayaran digital membantu pelaku usaha lokal beradaptasi dengan perubahan zaman (Yunus & Lestari, 2022).

PEMBAHASAN

Temuan penelitian ini menguatkan bahwa peran pemerintah tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga sangat strategis dalam menciptakan ekosistem kewirausahaan yang kondusif. Peran ini menjadi krusial dalam menumbuhkan jiwa wirausaha masyarakat, terutama di kalangan pemuda, perempuan, dan kelompok rentan lainnya.

Namun demikian, sebagian artikel juga mencatat bahwa tantangan koordinasi antarinstansi, keterbatasan anggaran, serta pendekatan kebijakan yang masih bersifat top-down dapat menghambat efektivitas program. Oleh karena itu, pelibatan aktif masyarakat dalam tahap perencanaan dan pelaksanaan program perlu ditingkatkan agar kebijakan lebih kontekstual dan partisipatif.

Secara umum, review ini memperlihatkan bahwa pembangunan jiwa kewirausahaan melalui intervensi pemerintah perlu diarahkan secara lebih holistik dan terintegrasi, tidak hanya melalui pelatihan atau bantuan modal, tetapi juga penguatan

mindset, jejaring, dan inovasi.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil Systematic Literature Review terhadap 25 artikel yang terbit antara tahun 2022 hingga 2024, dapat disimpulkan bahwa pemerintah memiliki peran strategis dalam menumbuhkan jiwa wirausaha masyarakat melalui berbagai kebijakan dan program. Peran tersebut tercermin dalam empat aspek utama, yaitu penyusunan kebijakan pro-kewirausahaan, penyelenggaraan pelatihan dan pendidikan kewirausahaan, fasilitasi akses permodalan dan inkubasi usaha, serta integrasi teknologi dan digitalisasi.

Temuan juga menunjukkan bahwa efektivitas program pemerintah sangat dipengaruhi oleh kemampuan dalam menyesuaikan kebijakan dengan kebutuhan lokal, kolaborasi lintas sektor, serta keterlibatan aktif masyarakat. Meskipun banyak kebijakan yang bersifat top-down, beberapa studi menyarankan pendekatan partisipatif dan berbasis komunitas agar program lebih tepat sasaran.

Oleh karena itu, diperlukan penguatan koordinasi antarinstansi, evaluasi kebijakan secara berkala, serta pengembangan ekosistem kewirausahaan yang holistik dan berkelanjutan. Pemerintah juga perlu terus berinovasi dalam desain intervensi agar dapat mendorong lahirnya wirausahawan tangguh yang mampu menghadapi tantangan ekonomi di era digital.

DAFTAR PUSTAKA

- Prasetyo, A., & Yuliani, T. (2022). Kebijakan Pemerintah dalam Meningkatkan Jiwa Kewirausahaan Masyarakat Desa. *Jurnal Administrasi Publik*, 19(1), 45–55.
- Rohmah, S. N., & Putra, R. H. (2023). Efektivitas Pelatihan Kewirausahaan Pemerintah Daerah terhadap UMKM Pasca Pandemi. *Jurnal Ekonomi dan Kewirausahaan*, 14(2), 112–125.
- Suryaningsih, D., Maulana, H., & Ardiansyah, M. (2023). Pemberdayaan Ekonomi Lokal Melalui Program Inkubasi Wirausaha Pemerintah. *Jurnal Ilmu Sosial dan Pemerintahan*, 7(1), 22–34.
- Yunus, M., & Lestari, F. (2022). Digitalisasi Kewirausahaan dan Peran Pemerintah dalam Ekonomi Era 5.0. *Jurnal Inovasi Ekonomi*, 10(4), 98–109.
- Kementerian Koperasi dan UKM RI. (2023). Laporan Tahunan UMKM dan Kewirausahaan Nasional 2023. Jakarta: KemenKopUKM.
- OECD. (2022). *The Missing Entrepreneurs 2022: Policies for Inclusive Entrepreneurship*. OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/5jlwq6r8jvhl>
- Fitriani, D., & Andika, R. (2023). Efektivitas Kurikulum Kewirausahaan dalam Meningkatkan Minat Usaha Siswa SMK. *Jurnal Vokasi Indonesia*, 5(2), 56–67.
- Rahayu, S., Utami, N., & Pradana, R. (2023). Pengaruh Pendidikan terhadap Jiwa Wirausaha Mahasiswa. *Jurnal Pendidikan Ekonomi*, 7(1), 22–33.
- Susanto, T., & Fadillah, A. (2022). Peran Negara dalam Pemberdayaan Ekonomi Lokal. *Jurnal Administrasi Publik*, 13(1), 34–46.
- Lestari, M., Diah, R., & Putri, A. (2022). Evaluasi Kebijakan Publik dalam Mendukung UMKM di Indonesia. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 9(4), 98–110.
- Putra, H., & Sari, N. (2022). Systematic Literature Review: Konsep dan Implementasinya dalam Penelitian Sosial. *Jurnal Ilmiah Metodologi Penelitian*, 3(1), 12–24.
- Yunita, D., & Kurniawan, B. (2023). Penggunaan PRISMA dalam Review Sistematis: Studi Literatur pada Topik Kewirausahaan Sosial. *Jurnal Riset Sosial Humaniora*, 5(2), 45–55.